

TINJAUAN YURIDIS PASAL 3 UU No.20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Hani'atus Solikah

ABSTRAK

Pendidikan budaya dan karakter bangsa pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional. Rumusan tujuan pendidikan secara jelas dengan mengutip dari pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yaitu bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mengacu pada makna rumusan tujuan pendidikan tersebut di atas, jika kita sederhanakan bahwa tujuan pokok pendidikan adalah agar anak dapat menjadi pribadi yang pandai (cerdas) dan baik (perilakunya). Masyarakat pada umumnya mudah menyebutnya serta setuju bahwa pandai atau cerdas dan baik atau berperilaku baik adalah tujuan pokok pendidikan.

Pembangunan karakter dan jati diri bangsa merupakan cita-cita luhur yang harus diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang terarah dan berkelanjutan. Penanaman nilai-nilai akhlak, moral, dan budi pekerti seperti tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional harus menjadi dasar pijakan utama dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (pasal 3). Tujuan pendidikan nasional jelas telah meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam menopang pembangunan karakter dan jati diri bangsa. Namun, penyelenggaraan pendidikan telah mengalami degradasi yang sangat mengkhawatirkan, di mana nilai-nilai kearifan lokal telah terbungkus oleh kuatnya arus pendidikan global, kecerdasan pribadi intelektual menjadi ukuran yang lebih dominan untuk menentukan keberhasilan dalam menempuh pendidikan, dan upaya penyeragaman kemampuan telah membelenggu tumbuh dan berkembangnya keragaman kemampuan sebagai pencerminan beragamnya kekayaan budaya bangsa. Akibatnya, menipisnya tata krama, etika, dan kreatifitas anak bangsa menjadi fenomena yang perlu mendapat perhatian serius dalam menata pendidikan di masa yang akan datang. Oleh karena itu pendidikan budaya dan karakter bangsa dipandang sebagai solusi cerdas untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kepribadian unggul, berakhlak mulia, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keindonesian secara menyeluruh.

Kata kunci:

Pasal 3 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan budaya dan karakter bangsa, Membangun karakter bangsa Indonesia melalui Pendidikan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi, seluruh aspek kehidupan bangsa sangat terguncang, kita merasakan krisis multidimensional melanda kita, di bidang politik, ekonomi, hukum nilai kesatuan dan keakraban bangsa menjadi longgar, nilai - nilai agama budaya dan ideology terasa kurang diperhatikan, terasa pula pembangunan material dan spiritual bangsa tersendat. Dalam keadaan seperti sekarang ini tampak perilaku masyarakat menjadi lebih korup bagi yang punya kesempatan, bagi rakyat awam dan rapuh tampak bringas dan mendemonstrasikan sikap anti sosial, anti kemapanan dan kontra produktif serta goyah dalam emosinya. Bagi kita bangsa yang masih sadar, sabar dan tawakal perlu melaksanakan diagnosis terhadap sikap dan perilaku yang menyimpang dari norma dan moral yang kurang terkendali ini. perlu di pola terapi melalui senyum karakter bangsa dan pendekatan keakraban nasional.

Langkah dan upaya penyembuhan dari penyimpangan perilaku fisik dan mental psikologis bangsa ini kita mulai dengan pendekatan agama, pendidikan dan kesejahteraan material dan spiritual. Yang utama memerlukan perhatian adalah membangkitkan kesadaran jiwa untuk menggairahkan peran hati nurani kita sebagai makhluk Tuhan, sebagai pribadi dan sebagai bangsa Indonesia. Kemudian perbaiki manajemen pendidikan nasional, semua harus sepakat mau dibawa kemana bangsa ini dengan pendidikan, semua berhemat dengan biaya pendidikan. Semua harus menjadi pendidik, jadi guru dan sekaligus jadi peserta didik. inilah revolusi pembelajaran yang inovatif yang dapat mendorong peserta didik belajar.

Karakter dan jati diri bangsa Indonesia sebenarnya lahir dan terbentuk melalui proses sejarah yang cukup panjang, sejak zaman neolitikum, zaman Hindu Budha, era perkembangan kerajaan-kerajaan Islam, sampai kemudian datangnya bangsa asing

yang menguasai masyarakat/bangsa di wilayah Kepulauan Nusantara ini. Pada periode-periode itu, beratus-ratus tahun lamanya, masyarakat telah membangun kehidupan atas dasar spiritualisme, kegotongroyongan, musyawarah untuk mufakat, toleransi, saling menghargai dan tolong menolong antarsesama, ditambah etos juang yang tinggi melalui berbagai perlawanan untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa, dan ini terus berlanjut pada masa pergerakan nasional. Masyarakat ini terus berjuang untuk mewujudkan sebagai bangsa merdeka, mandiri atas dasar prinsip yang tersimpul dalam pandangan dan falsafah hidup bangsa. Setelah melalui proses panjang itu maka sampailah kepada saat yang berbahagia untuk menemukan jati diri sebagai bangsa setelah terjadinya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dengan berbagai nilai dan ciri khas, sifat dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain. Oleh para pendiri negara, nilai, ciri khas dan karakter itu dirumuskan secara simpel dalam lima prinsip yang disebut Pancasila. Pancasila inilah yang menjadi karakter dan kepribadiannya bangsa Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia mempunyai filsafat hidup Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pun disusun atas dasar pancasila. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika pendidikan di Indonesia juga berdasarkan pada Pancasila, seperti termaktub dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950, Bab III pasal 4 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran, yang berbunyi :

“Pendidikan dan pengajaran berdasar atas asas-asas yang termaktub dalam pancasila, undang-undang dasar (UUD) negara kesatuan republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia”

Hingga kini, dasar pendidikan nasional secara yuridis masih sama, belum berubah. Hal itu ditetapkan kembali dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003, bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini yang kebetulan berada di era global, bangsa Indonesia harus memiliki visi prospektif dan pandangan hidup yang kuat agar tidak didekte, dan diombang-ambingkan oleh kekuatan asing. Visi pembangunan jangka panjang tahun 2005 - 2025: "Indonesia yang maju, mandiri, adil dan makmur," memerlukan landasan yang kokoh, dan suasana yang kondusif. Namun kondisi yang kondusif dan landasan yang kokoh itu kalau dikaitkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di lingkungan sebagian masyarakat terutama kaum remajanya, masih mengkhawatirkan. Kita menghadapi kondisi kehidupan dan masalah sosio kebangsaan yang memprihatinkan. Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini ternyata belum seperti yang dicita-citakan. Peristiwa politik tahun 1998 yang telah mengakhiri kekuasaan Orde Baru dengan berbagai euforianya ternyata masih menyisakan luka mendalam di berbagai aspek kehidupan. Berbagai bentuk pelanggaran masih terus terjadi. Tindakan kekerasan dan pelanggaran HAM, perilaku amoral dan runtuhnya budi pekerti luhur, semau aku dan tidak disiplin, anarkhisme dan ketidaksabaran, korupsi, ketidakjujuran dan budaya nerabas, rentannya kemandirian dan jati diri bangsa, terus menghiasi kehidupan bangsa kita. Semangat kebangsaan kita turun tajam dan di mata masyarakat internasional seperti kita telah kehilangan karakter yang selama beratus-ratus tahun bahkan berabad-abad kita bangun. Pancasila yang merupakan dasar negara dan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi tidak aplikatif. Nilai-nilai Pancasila yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia menjadi terabaikan. Lambang ataupun simbol-simbol kenegaraan yang sebenarnya menjadi instrumen penting untuk

menumbuhkan kecerdasan emosional, mempertajam nurani, mengembangkan motivasi dan semangat serta menggerakkan rasa cinta kepada tanah air menjadi terlupakan.

Persoalan budaya dan karakter bangsa kini menjadi sorotan tajam masyarakat. Sorotan itu mengenai berbagai aspek kehidupan, tertuang dalam berbagai tulisan di media cetak, wawancara, dialog, dan gelar wicara di media elektronik. Selain di media massa, para pemuka masyarakat, para ahli, dan para pengamat pendidikan, dan pengamat sosial berbicara mengenai persoalan budaya dan karakter bangsa di berbagai forum seminar, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Persoalan yang muncul di masyarakat seperti korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massa, kehidupan ekonomi yang konsumtif, kehidupan politik yang tidak produktif, dan sebagainya menjadi topik pembahasan hangat di media massa, seminar, dan di berbagai kesempatan.

Ir. Sukarno, Presiden RI pertama mengemukakan pentingnya membangun jati diri bangsa melalui pembangunan karakter bangsa atau yang di sebut Bung Karno sebagai national and character building. Para pendiri bangsa (founding fathers) Indonesia bersepakat membangun jati diri atau membangun karakter bangsa mesti dilaksanakan secara berkesinambungan dari kemajemukan masyarakat Indonesia.

Indonesia sebagai bangsa tidak lahir dalam bentuk langsung jadi, tetapi melalui proses sejarah yang cukup panjang. Para pendiri bangsa (founding fathers) Indonesia menetapkan empat pilar pondasi jati diri bangsa. Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui empat pilar pondasi bangsa itu bangsa Indonesia membangun jati diri dan karakter bangsa Indonesia.

Menyadari bahwa membangun karakter bangsa diperlukan suatu kesinambungan itulah seperti dikutip, Kihajar Dewantoro Bapak pendidikan nasional mengungkapkan bahwa, "....pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect) dan tubuh anak. Bagian - bagian itu tidak boleh di pisahkan agar kita dapat memajukan kesempurnaan hidup anak - anak kita."¹

Sistem nilai budaya itu merupakan pengarah bagi tindakan manusia, maka pedomannya yang nyata adalah norma - norma hukum dan aturan yang biasanya bersifat tegas dan kongkrit. adapun norma - norma hukum dan aturan - aturan tadi bersumber kepada system nilai - nilai budaya dan sering merupakan perincian dari konsep - konsep abstrak dalam sistem itu.

Sistem nilai budaya dan sikap yang keduanya sering disebut dengan istilah populer sikap mental menjadi suatu yang penting bagi kita untuk melakukan penalaran secara obyektif, sikap mental macam apa yang sesuai dalam membangun jati diri dan karakter bangsa.

Berbagai alternatif penyelesaian diajukan seperti peraturan, undang-undang, peningkatan upaya pelaksanaan dan penerapan hukum yang lebih kuat. setidaknya gambaran tersebut menggelitik kita untuk bertanya kembali. Adakah yang salah dengan karakter bangsa ini?

Alternatif lain yang banyak dikemukakan untuk mengatasi, paling tidak mengurangi, masalah budaya dan karakter bangsa yang dibicarakan itu adalah pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai alternatif yang bersifat preventif karena pendidikan membangun generasi baru bangsa yang lebih baik. Sebagai alternatif yang bersifat preventif, pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas

generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan karakter bangsa. Memang diakui bahwa hasil dari pendidikan akan terlihat dampaknya dalam waktu yang tidak segera, tetapi memiliki daya tahan dan dampak yang kuat di masyarakat.

Kepedulian masyarakat mengenai pendidikan budaya dan karakter bangsa telah pula menjadi kepedulian pemerintah. Berbagai upaya pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa telah dilakukan di berbagai direktorat dan bagian di berbagai lembaga pemerintah, terutama di berbagai unit Kementerian Pendidikan Nasional. Upaya pengembangan itu berkenaan dengan berbagai jenjang dan jalur pendidikan walaupun sifatnya belum menyeluruh. Keinginan masyarakat dan kepedulian pemerintah mengenai pendidikan budaya dan karakter bangsa, akhirnya berakumulasi pada kebijakan pemerintah mengenai pendidikan budaya dan karakter bangsa dan menjadi salah satu program unggulan pemerintah, paling tidak untuk masa 5 (lima) tahun mendatang. Pedoman sekolah ini adalah rancangan operasionalisasi kebijakan pemerintah dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 3 menjelaskan fungsi dan tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Implikasi dari undang – undang tersebut bahwa, pendidikan di setiap jenjang dan harus diselenggarakan secara terprogram dan

¹ Alternative membangun jati diri, Nurjaman Insastra

sistematis mengarah kepada pencapaian tujuan pendidikan nasional.²

Selanjutnya Pembangunan di bidang budaya sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap keberagaman budaya, pentingnya toleransi, dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta mulai berkembangnya interaksi antarbudaya. Namun, di sisi lain upaya pembangunan jatidiri bangsa Indonesia, seperti penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air dirasakan makin memudar. Hal tersebut disebabkan antara lain, karena belum optimalnya upaya pembentukan karakter bangsa, kurangnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh pada hukum, cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, dan kurang mampunya menyerap budaya global yang lebih sesuai dengan karakter bangsa, serta ketidakmerataan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ditambah lagi dengan pemberitaan media baik cetak maupun elektronik yang tidak mendidik, ditengarai berpengaruh negatif terhadap perkembangan karakter dan pencapaian hasil belajar peserta didik.

Berbagai persoalan yang muncul di masyarakat seperti korupsi, kekerasan, kejahatan seksual, perusakan, perkelahian massa, tawuran antarpelajar, turunnya kewibawaan guru di mata peserta didik, pola hidup konsumtif, dan sebagainya menjadi topik pembahasan hangat. Bangsa kita menghadapi permasalahan seperti disorientasi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila; bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa; ancaman disintegrasi bangsa; melemahnya kemandirian bangsa. Berbagai

alternatif penyelesaian diajukan antara lain dibuatnya peraturan yang berkaitan dengan penguatan kembali budaya dan karakter bangsa. Salah satu peraturan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang "Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa." dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 yang mengamanatkan program penguatan metodologi dan kurikulum dengan cara menyempurnakan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai - nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Implikasi dari instruksi tersebut adalah pengembangan budaya dan karakter bangsa melalui pendidikan.³

Pendidikan dipilih sebagai alternatif utama pengembangan budaya dan karakter bangsa karena pendidikan merupakan sarana pembangun generasi baru bangsa. Melalui pendidikan diharapkan dapat terwujud peningkatan kualitas generasi muda bangsa yang mampu meminimalisasi penyebab berbagai permasalahan budaya dan karakter bangsa. Selama ini, pendidikan belum memberikan kontribusi yang berarti dalam pembentukan karakter peserta didik seiring dengan pencapaian kompetensinya.

Pendidikan budaya dan karakter bangsa ditengarai baru menyentuh pada tingkatan pengenalan norma atau nilai-nilai karakter, belum pada tingkatan internalisasi nilai - nilai karakter dan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Padahal kesuksesan seseorang tidak semata - mata ditentukan oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (*hard skill*) saja, tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan orang lain (*soft skill*).

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Jakarta, 2003 hal 11

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pdf

Pendidikan budaya dan karakter bangsa seharusnya membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara kognitif (*knowing the good*), penghayatan nilai secara afektif (*feeling the good*), dan pengamalan nilai-nilai karakter secara nyata dalam kehidupan sehari-hari (*acting the good*). Dengan kata lain, pendidikan karakter harus melibatkan pengetahuan yang baik (*moral knowing*), perasaan yang baik atau loving good (*moral feeling*) dan perilaku yang baik (*moral action*) sehingga terbentuk perwujudan kesatuan perilaku dan sikap hidup peserta didik.

Permasalahan pendidikan karakter melalui jalur pendidikan perlu segera dikaji, dan dicari alternatif solusinya, serta dikembangkan secara lebih operasional sehingga dapat diimplementasikan Dalam kehidupan sehari-hari.

Mengacu kepada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dinyatakan di atas, maka Implementasi Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, dilakukan melalui integrasi pada mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah. Pendidikan budaya dan karakter bangsa pada intinya bertujuan mengembangkan karakter setiap individu agar mampu mewujudkan nilai-nilai luhur Pancasila; mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik; memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang pluralism, dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia. Proses ini melibatkan kerjasama seluruh warga sekolah. Sehubungan dengan itu, pendidikan budaya dan karakter bangsa dilakukan dengan pendekatan sistematis dan integratif dengan optimalisasi seluruh sumber daya pendukung yang ada di sekolah, keluarga, dan di masyarakat.

Penerapan pendidikan budaya dan karakter bangsa dilaksanakan secara komprehensif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan program

tindaklanjut. Pada dasarnya pendidikan budaya dan karakter bangsa telah dilaksanakan, Namun pelaksanaannya belum terdokumentasi secara baik sehingga belum dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Sehubungan dengan itu penulis akan mengadakan penelitian melalui sejarah pendidikan budaya karakter bangsa di tingkat sekolah menengah atas untuk memantapkan dan mengaktualisasikan kembali nilai - nilai pancasila, untuk memandu jalannya kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dan memecahkan berbagai permasalahannya melalui jalur pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang penulis uraikan dalam latar belakang permasalahan tersebut diatas, beberapa rumusan permasalahan pokok yang akan diteliti oleh penulis dalam penulisan tesis ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan sejarah pengaturan pendidikan budaya dan karakter bangsa di Indonesia ?
2. Apakah isi pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 bisa dipakai sebagai dasar pembentukan pendidikan budaya dan karakter bangsa ?
3. Bagaimana sebaiknya pengaturan pendidikan budaya dan karakter bangsa di Indonesia ke depan ?

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Adapun titik tolak penelitian di tekankan pada analisis terhadap pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mendasari pendidikan budaya dan karakter bangsa melalui jalur pendidikan.

B. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan jenis penelitian hukum yang akan dilakukan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach), Pendekatan konsep (conceptual approach), Pendekatan sejarah (history approach) Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti Pendidikan budaya karakter dan bangsa di Indonesia dalam perspektif sejarah yang berhubungan dengan topik permasalahan, dalam hal pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mendasari pendidikan budaya dan karakter bangsa melalui jalur pendidikan, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan khususnya peserta didik yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia, secara utuh, terpadu, dan seimbang, yang bersumber pada nilai - nilai yang membentuk karakter bangsa yaitu agama, Pancasila, budaya dan tujuan pendidikan nasional sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hierarki mulai dari UUD Negara Republik Indonesia 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden, Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan lainnya di bawah Undang-Undang. Peraturan ini bertitik tolak pada pasal 3 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mendasari pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku - buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, tesis-tesis terdahulu, internet yang berkaitan dengan permasalahan serta simposium, seminar - seminar yang dilakukan

para pakar terkait dengan pembahasan tentang pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder di kumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan untuk kemudian diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku melalui studi kepustakaan baik kepustakaan umum, maupun kepustakaan pribadi.

E. Teknik Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Analisis data merupakan hal penting dalam proses penelitian. Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang di peroleh dari penelitian. sehingga diperlukan suatu proses penyederhanaan data, agar data - data yang diperoleh lebih mudah di bicarakan dan diinterpretasikan. Dengan demikian akan diperoleh suatu data yang akurat.

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan, aturan perundang - undangan dan artikel dapat dianalisis dengan uraian-uraian sehingga menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari obyek penelitian. Selanjutnya data yang telah dianalisis, diinterpretasikan dengan pedoman pada teori - teori yang berhubungan dengan itu, sehingga dapat dikaji dan dianalisis Tinjauan yuridis Undang - Undang No. 20 tahun 2003 pasal 3 khususnya tentang Pendidikan budaya dan karakter bangsa di indonesia dalam perspektif sejarah yang dimaksud dalam rumusan permasalahan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif yaitu

menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

PEMBAHASAN

Perkembangan Sejarah Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa Di Indonesia

Secara umum, pendidikan bermakna sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan, baik jasmani maupun rohani, sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Bagi kehidupan umat manusia, pendidikan merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Tanpa pendidikan, mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup dan berkembang sejalan dengan aspirasi (cita-cita) untuk maju, sejahtera dan bahagia menurut konsep pandangan hidup mereka.

Dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai "usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kemampuan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia mempunyai filsafat hidup Pancasila, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pun disusun atas dasar pancasila. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika pendidikan di Indonesia juga berdasarkan pada Pancasila, seperti termaktub dalam Undang - undang Nomor 4 Tahun 1950, Bab III pasal 4 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran, yang berbunyi :

"Pendidikan dan pengajaran berdasar atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia".

Dasar pendidikan nasional secara yuridis masih sama, belum berubah. Hal itu ditetapkan kembali dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2003, bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Berbeda dengan dasar pendidikan di Indonesia yang tidak berubah, yakni Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tujuan penyelenggaraan pendidikan di negeri ini secara yuridis (undang - undang) selalu berubah-ubah. Hal itu bisa kita lacak dalam informasi tentang perubahan-perubahan yang dimaksud berikut ini :

1. Rumusan tujuan pendidikan menurut Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1950. Tercantum dalam bab II pasal 3, ungkapan yang berbunyi : *"Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air".*
2. Rumusan tujuan pendidikan menurut ketetapan MPRS Nomor II Tahun 1960 adalah : *"Tujuan pendidikan ialah mendidik anak ke arah terbentuknya manusia yang berjiwa Pancasila dan bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Pancasila yang adil dan makmur material dan spiritual."*
3. Rumusan tujuan pendidikan menurut Sistem Pendidikan Nasional Pancasila dengan penetapan presiden Nomor 19 tahun 1965 adalah sebagai berikut : *"Tujuan pendidikan nasional kita, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, dari pendidikan pra-sekolah sampai pendidikan tinggi, supaya melahirkan warganegara-warganegara sosialis Indonesia yang susila, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil makmur baik spiritual maupun material*

dan yang berjiwa Pancasila, yaitu : ketuhanan yang maha esa, perikemanusiaan yang adil dan beradab, kebangsaan, kerakyatan, keadilan sosial, seperti dijelaskan dalam manipol/usdek”.

4. Rumusan tujuan pendidikan menurut ketetapan MPRS Nomor XXVII Tahun 1966, berbunyi sebagai berikut : *“Tujuan pendidikan ialah membentuk manusia pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dan isi Undang-undang Dasar 1945”.*
5. Dan tujuan pendidikan nasional menurut Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah *“untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”*

Perubahan-perubahan tersebut dimungkinkan akan terus terjadi, akibat dari perkembangan zaman dan seiring dengan perubahan iklim politik atau rezim pemerintahan yang berkuasa. Jelas, pengaruh negara terhadap terselenggaranya pendidikan di tanah air sangat kuat. Kita sering mendengar bahwa setiap ganti presiden, menteri, departemen, maka akan ganti kebijakan. Dalam konteks ini, dunia pendidikan tidak lepas dari rezim yang berkuasa. Dan bila kita ingin melacak lebih jauh tentang sebab musabab terjadinya perubahan, kita sebenarnya bisa berawal dari asumsi atau anggapan tersebut.

Tentu saja, kita berharap bahwa perubahan tersebut menuju ke arah yang lebih sempurna dan berpijak pada prinsip keadilan dalam segala aspek kehidupan, dan pada nilai-nilai sosio - budaya Bangsa Indonesia yang multikultural, bukan hanya pada pertimbangan politis saja. Bila dalam melakukan perubahan ini masih memakai

kaca mata kuda, maksudnya hanya mempertimbangkan satu sisi saja, katakanlah demi kepentingan politis, maka pasti landasan yuridis tentang tujuan pendidikan tersebut akan terombang-ambing, bahkan akan mudah hancur dalam menghadapi perkembangan dan tantangan dunia pendidikan yang sangat kompleks seiring dengan perkembangan global.

Isi pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 Bisa Dipakai Sebagai Dasar Pembentukan Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa

Dalam perspektif pendidikan, Allah SWT. telah memberikan bimbingan dan petunjuk untuk dijadikan acuan teori, konsep maupun praktek pendidikan dalam menyiapkan generasi penerus untuk mengemban tugas kekhilafahan di muka bumi ini. Salah satunya sebagaimana tersirat dalam Al Quran surat An Nisa' ayat 9 yang artinya sebagai berikut :

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Kutipan ayat tersebut memiliki nilai universal dan mengingatkan kita semua untuk tidak meninggalkan generasi masa depan yang lemah; yaitu baik lemah secara fisik, intelektual, moral, sosial maupun spiritual, sehingga pesan tersebut dapat dijadikan spirit pendidikan dalam mewujudkan generasi kuat dan sejahtera yang sanggup menghadapi tantangan zamannya.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, instrument strategik yang diyakini memiliki tingkat akurasi tinggi adalah melalui proses pendidikan. Ada pepatah China mengatakan bahwa jika anda mempunyai rencana kehidupan satu tahun, tanamlah padi; jika anda mempunyai rencana kehidupan sepuluh tahun, tanamlah pohon; dan jika

anda mempunyai rencana kehidupan sepanjang hayat, didiklah orang-orang.

Pendidikan dapat diartikan sebagai proses yang berkesinambungan, bahwa mendidik manusia adalah proses yang tidak akan pernah selesai. Pendidikan tidak berhenti ketika peserta didik menjadi dewasa tetapi akan terus menerus berkembang selama terdapat interaksi antara manusia dengan lingkungan sesama manusia serta dengan lingkungan alamnya. Pendidikan mempunyai tugas menumbuhkembangkan eksistensi manusia sebagai suatu keberadaan yang interaktif. Interaksi di sini bukan hanya interaksi dengan sesama manusia, tetapi juga dengan alam dan dunia ide termasuk dengan Sang Pencipta alam semesta Allah SWT. Pendidikan juga tidak dapat dan tidak boleh dipisahkan dari kebudayaan. Proses pendidikan adalah proses pembudayaan, dan proses pembudayaan adalah proses pendidikan. Menafikan pendidikan dari proses pembudayaan merupakan proses alienasi dari hakekat manusia dan dengan demikian alienasi dari proses humanisasi. Alienasi proses pendidikan dari kebudayaan berarti menjauhkan pendidikan dari perwujudan nilai-nilai moral di dalam kehidupan manusia (Tilaar, 2002 : 32).

Sementara menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan di artikan sebagai daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelektual) dan tubuh (fisik) anak. Ketiga hal tersebut, yaitu tumbuhnya budi pekerti, intelektual dan fisik anak tidak dapat dipisahkan agar supaya dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu kehidupan dan penghidupan anak-anak yang selaras dengan dunianya (Dewantara, 1977 : 14-15). Dalam pandangannya yang lain Ki Hajar Dewantara memberikan pengertian tentang maksud dan tujuan pendidikan sebagai berikut bahwa pendidikan adalah tuntunan di dalam tumbuhnya anak-anak, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan

sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak, berarti bahwa hidup tumbuhnya anak-anak itu berada di luar kemampuan dan kehendak pendidik. Anak-anak sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai benda hidup akan hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kodrat yang ada pada anak tiada lain adalah segala kekuatan di dalam hidup batin dan hidup lahir dari anak-anak. Jadi yang ada adalah kekuasaan kodrat. Para pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat tersebut agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya (Dewantara, 1977 : 20-21).

Dengan demikian tujuan pendidikan sebenarnya bukan semata penguasaan pengetahuan, keterampilan teknikal saja, karena ini sekedar alat, atau perkakas. Tetapi tujuan pendidikan adalah bertumpu pada anak itu sendiri yang dapat berkembang mencapai sempurnanya hidup manusia, sehingga bisa memenuhi segala bentuk keperluan hidup lahir dan batin. Ibarat suatu tanaman tujuan yang akan dicapai adalah bunganya, yang kelak akan menghasilkan buah. Demikian pula dalam pendidikan, bahwa buahnya pendidikan adalah matangnya jiwa, yang akan dapat mewujudkan hidup dan penghidupan yang sempurna dan memberikan manfaat bagi orang lain dan lingkungannya. Namun demikian, dalam prakteknya proses pendidikan harus berhadapan dengan main-stream global yang tidak bisa kita hindari, yaitu arus globalisasi. Globalisasi adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihadang oleh kekuatan apapun. Pada dasarnya globalisasi merupakan proses kemajuan yang melahirkan ketergantungan antar bangsa dan Negara, yang ditandai oleh derasnya arus informasi, komunikasi, lalu lintas barang, jasa dan modal, bahkan tenaga kerja, secara bebas antar Negara.

Globalisasi merupakan fenomena bagaikan pisau bermata dua; satu sisi memberi dampak positif, sedangkan sisi yang lain member dampak negative. Pada sisi positif, globalisasi menyebabkan terjadinya perluasan pasar yang berdampak terhadap kenaikan pendapatan suatu bangsa. Dalam bidang sosial politik, globalisasi membawa angin segar pada system dan tata pemerintahan yang cenderung member kebebasan dan kedaulatan kepada rakyat. Dalam bidang budaya, globalisasi menyebabkan interaksi antar bangsa yang semakin massif dan intens, sehingga arus pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan semakin terbuka. Sementara sisi negative dari globalisasi juga tidak kalah banyaknya. Di bidang ekonomi menyebabkan semakin menganga jurang antara kelompok kaya dan miskin. Dalam bidang social politik demokrasi cenderung mengarah pada demokrasi tanpa batas. Dalam bidang budaya, adanya globalisasi membawa dampak pada mudahnya warga masyarakat di Negara-negara sedang berkembang, termasuk Indonesia meniru budaya Negara luar, dalam berbagai bentuk. Seperti, pola pergaulan, pola berpakaian, pola makan, dan berbagai pola perilaku lain yang pada gilirannya justru dapat merusak harkat, martabat dan jati diri bangsa itu sendiri (Zamroni, 2011 : 65). Selain ekses globalisasi di atas, masyarakat dan bangsa Indonesia juga dihadapkan pada persoalan laten internal, diantaranya budaya korupsi pada semua lapisan mulai dari tukang parkir hingga bankir, dari rakyat hingga pejabat baik yang berpendidikan rendah sampai berpendidikan tinggi. Persoalan laten lainnya adalah pemakaian kekerasan dalam memecahkan masalah, rendahnya didiplin, pengrusakan lingkungan, rasa permusuhan antar kelompok, antar golongan juga masih membayangi kelabunya wajah negeri tercinta ini.

Prinsip-prinsip Pendidikan Karakter

Kementerian Pendidikan Nasional dalam panduan pelaksanaan pendidikan karakter memberikan acuan bahwa pendidikan karakter harus didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Mempromosikan nilai-nilai dasar etika sebagai basis karakter.
2. Mengidentifikasi karakter secara komprehensif supaya mencakup pemikiran, perasaan, dan perilaku.
3. Menggunakan pendekatan yang tajam, proaktif dan efektif untuk membangun karakter.
4. Menciptakan komunitas sekolah yang mempunyai kepedulian.
5. Member kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan perilaku yang baik.
6. Memiliki cakupan terhadap kurikulum yang bermakna dan menantang yang menghargai semua peserta didik, membangun karakter mereka, dan membantu untuk sukses.
7. Mengusahakan tumbuhnya motivasi diri pada para peserta didik
8. Memfungsikan seluruh staf sekolah sebagai komunitas moral yang berbagi tanggungjawab untuk pendidikan karakter dan setia pada nilai dasar yang sama.
9. Adanya pembagian kepemimpinan moral dan dukungan luas dalam membangun inisiatif pendidikan karakter.
10. Memfungsikan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam usaha membangun karakter.
11. Mengevaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai guru-guru karakter dan manifestasi karakter positif dalam kehidupan peserta didik.

Mengacu pada Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional “*Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak*

serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab" oleh karena itu, dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa Kemendiknas telah merumuskan materi pendidikan budaya dan karakter bangsa yang mencakup :

No	Karakter	No	Karakter
1	Religius	10	Semangat kebangsaan
2	Jujur	11	Cinta Tanah Air
3	Toleransi	12	Menghargai prestasi
4	Disiplin	13	Bersahabat/Komunikatif
5	Kerja Keras	14	Cinta Damai
6	Kreatif	15	Gemar membaca
7	Mandiri	16	Peduli Lingkungan
8	Demokratis	17	Peduli sosial
9	Rasa ingin tahu	18	Tanggung jawab

Pendidikan Budaya Dan Karakter Bangsa Indonesia Ke Depan

Untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan, maka pendidikan karakter merupakan suatu keniscayaan sebab pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk manusia yang berwatak dan cerdas. Hal yang senada juga dikatakan oleh Socrates bahwa tujuan paling mendasar pendidikan karakter adalah membuat manusia *good* dan *smart* . seorang penyair Arab Syauqi Bey pernah berkata bahwa *"Sesungguhnya kejayaan suatu umat (bangsa) terletak pada akhlak/karakternya. Jika itu telah runtuh, maka runtuh pulalah bangsa itu."* Jika kita perhatikan pendapat Socrates dan penyair Arab ini maka sungguh sangat relevan dengan hadist Rasulullah bahwa *"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan budi pekerti (HR Ahmad)."* Cirri dasar yang membedakan dengan makhluk lainnya (termasuk binatang) adalah

akhlaq. Jika akhlaq/karakter manusia sama dengan akhlaq/karakter binatang maka dapat dibayangkan seperti apa gerangan yang terjadi di muka bumi ini padahal manusia ditakdirkan sebagai khalifatullah, yaitu sebagai pembawa dan pelaksana amanah untuk mewujudkan "sifat-sifat" ketuhanan di atas bumi ini.

Republik Indonesia sebagai salah satu Negara di atas bumi ini menganut paham ketuhanan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, selain sila kemanusiaan, persatuan, demokrasi/musyawaharah, dan keadilan social. Apabila akhlaq atau karakter dalam sila-sila Pancasila tersebut diperhatikan dan dibandingkan dengan realitas social, ternyata memang banyak terjadi gap atau ketidaksesuaian antara teori dan praktik dalam bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

Pendidikan budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau kebajikan yang menjadi nilai dasar budaya dan karakter bangsa. Kebajikan yang menjadi atribut suatu karakter pada dasarnya adalah nilai. Oleh karena itu pendidikan budaya dan karakter bangsa pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau idelgi bangsa Indonesia, agama, budaya, dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional. Rumusan tujuan pendidikan secara jelas dengan mengutip dari Undang - Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada TYME, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung-jawab(pasal3).

Mengacu pada makna rumusan tujuan pendidikan tersebut di atas, jika kita sederhanakan bahwa tujuan pokok pendidikan adalah agar anak dapat menjadi pribadi yang pandai (cerdas) dan baik (perilakunya). Masyarakat pada umumnya mudah menyebutnya serta setuju bahwa pandai atau cerdas dan baik atau berperilaku baik adalah tujuan pokok pendidikan. Untuk mendapatkan wawasan mengenai arti pendidikan budaya dan karakter bangsa perlu pemahaman pengertian istilah budaya, karakter bangsa dan pendidikan. Disisi lain, bagaimana domain budaya, karakter, dan pendidikan terintegrasikan dalam konsetks standar kompetensi, kompetensi dasar, da indicator hasil belajar pada satuan mata pelajaran, penting untuk diurai secara lebih detail, sehingga kalangan guru memiliki wawasan dan keterampilan yang memadai dalam melakukan elaborasi pada mata pelajaran yang diampunya.

Sejarah dan Pembentukan Karakter Bangsa

Jangan Sekali-kali Melupakan Sejarah (Jas Merah)Ir Soekarno

Ungkapan bahwa sejarah adalah guru kehidupan ternyata masih sebatas kata-kata (*Kompas Jumat, 9 Juli 2010*). Sejarah sebagai mata pelajaran dimulai sejak Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Atas belum bisa memberikan kontribusi dalam pembentukan karakter bangsa sesuai visi pendidikan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter sesuai "*nations and character building*". Peranan pendidik dalam hal ini guru sejarah sangat berpengaruh, kalau guru hanya mendongeng dan bercerita tidak obahnya seperti pendongeng, maka sejarah membosankan dan tidak memiliki arti. Selanjutnya adalah model pembelajaran tidak menarik sehingga tidak jarang murid tertidur dan bosan. Padahal harus diketahui bersama bahwa persoalan jati diri bangsa dan perubahan ada dalam sejarah yang semestinya harus

diajarkan dengan sistem yang baik dan dengan kurikulum yang baik pula. Sistem pendidikan sejarah selama ini sering diartikan sebagai *transfer ilmu*, pengajaran sejarah cenderung berperan sekedar menyampaikan pengetahuan yang dimiliki guru kepada siswa tentang ilmu sejarah, sementara makna yang terkandung dalam setiap peristiwa sejarah dibiarkan mengauap begitu saja. Oleh sebab itu bisa ditarik kesimpulan bahwa sangat rendah kualitas nilai dalam pendidikan sejarah sehingga apa yang disebut karakter bangsa tidak diketahui dan siswa tidak mengenal nilai perjuangan, jadi diri, perubahan sosial serta kekayaan bangsa.

Pendiikan sejarah harus diajarkan dengan bentuk baru dan tidak hanya sebatas produk , cenderung hanya memanfaatkan fakta sejarah sebagai materi utama. Sejatinnya harus diberikan pemahaman kepada anak didik untuk menggali makna dari sebuah peristiwa atau tokoh sejarah dan malalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bisa memberikan kearifan yang merupakan pembentuk karakter bangsa yang sangat efektif apalagi Indonesia diakui sebagi negara yang kaya akan budaya dan tradisi yang sejatinya tersimpan banyak nilai-nilai moral yang bisa mengangkat jati diri bangsa.

Pendidikan Multikultural Pada Materi Sejarah

Kekayaan bangsa Indonesia sangat luar biasa mulai dari keragaman budaya, bahasa serta tradisi yang menyimpan banyak nilai-nilai serta pedoman hidup manusianya dalam menjalankan kehidupan. Kekayaan ini tidak bisa dipungkiri menjadi aset bangsa yang tidak dimiliki negara-negara lain. Mulai dari Sabang hingga Merauke bisa kita lihat bagaimana kekayaan budaya dengan segala isinya menunjukakn ada kesamaan karakter yakni gotong royong serta persatuan dan kesatuan. Mengetahui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki kekhasan tersendiri tentu semua itu harus diketahui oleh semua rakyat Indonesia. Masyarakat

Sumatera Utara misalnya bisa mengetahui bagaimana budaya masyarakat Sulawesi Selatan sehingga dalam pergaulan berbangsa dan bernegara tidak mengalami kesulitan dan intinya adalah ada prinsip penghormatan dan penghargaan. Sehingga dengan terwujudnya pendidikan multicultural dalam pendidikan sejarah maka sikap pluralisme dan sikap saling menghormati terlihat jelas dan dengan nilai-nilai Pancasila dan isinya bangsa ini akan jauh dari konflik baik konflik antar suku, agama serta golongan (SARA). Sikap saling menghargai, gotong royong, menghormati inilah yang menjadi tujuan dari pendidikan multicultural pada pendidikan sejarah. Melalui nilai dan makna maka pemahaman masyarakat serta siswa pada khususnya akan melahirkan generasi masa depan bangsa yang memiliki karakter.

Pembinaan Watak Bangsa (Belajar dari Masa Lalu, Berpijak pada Masa Kini, dan Berorientasi ke Masa Depan)

Pada abad informasi saat ini banyak hal dari masa lalu dapat diketahui dan ditelusuri melalui pemahaman terhadap bagaimana orang pada masa lalu tersebut berkembang dan merespon setiap perubahan sehingga sampai pada era revolusi informasi terkini. Pemahaman seseorang terhadap sesuatu dapat dicapai melalui olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga. Dari keempat olah tersebut di atas diharapkan akan menimbulkan sifat bertanggung jawab, jujur, cerdas, kreatif, bersih, disiplin, peduli, dan sikap menolong.

Pembangunan Karakter Bangsa sebagai Suatu Tuntutan

Karakter bangsa adalah "kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang khas-baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara sebagai hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olah raga seseorang atau sekelompok orang." Karakter bangsa Indonesia akan menentukan

perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang khas - baik yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, norma Undang – Undang Degara Negara Republik Indonesia 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI."

Oleh karena itu, *national character building* adalah pembangunan watak atau karakter bangsa yang berhubungan dengan sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku, budi pekerti, serta akhlak. Pembangunan karakter bangsa merupakan bagian yang tidak terlepas dari pembangunan nasional yang berkesinambungan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang (terhitung mulai tahun 2005) ditargetkan untuk mencapai Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, salah satunya melalui pencapaian terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab. Pencapaian sasaran ini ditandai dengan:

1. Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi IPTEK.
2. Makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia Indonesia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian bangsa."

Kondisi yang terlihat saat ini adalah "...upaya pembangunan jati diri bangsa Indonesia, seperti penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air dirasakan makin memudar. Hal tersebut, disebabkan antara lain, karena belum optimalnya upaya pembentukan karakter bangsa, kurangnya keteladanan para pemimpin, lemahnya budaya patuh pada hukum, cepatnya penyerapan budaya global yang negatif, dan kurang mampunya menyerap budaya global yang lebih sesuai dengan karakter bangsa, serta ketidakmerataan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat." Lingkup sasaran pembangunan karakter bangsa yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa pada tahun 2010 meliputi: (1) lingkup keluarga; (2) lingkup satuan pendidikan; (3) lingkup pemerintahan; (4) lingkup masyarakat sipil; (5) lingkup masyarakat politik; (6) lingkup dunia usaha; serta (7) lingkup media massa.

Membangun Karakter Bangsa Melalui Reformasi Budaya

Bangsa kita tengah berada di persimpangan jalan. Kita hidup di tengah-tengah gelombang pengaruh kebudayaan dan peradaban yang demikian deras datangnya dari luar kehidupan kita sebagai akibat cepatnya laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan terjadinya globalisasi dalam semua bidang kehidupan. Di tengah suasana yang demikian, bangsa kita melakukan upaya-upara reformasi atau pembaruan di segala bidang kehidupan bernegara. Kita usung tema reformasi total sebagai jawaban atas kejenuhan dan kekecewaan kita kepada sistem kekuasaan yang kita warisi dari zaman Orde Baru yang tidak memberikan jaminan atas kebebasan individu warga, dan tidak berhasil mewujudkan impian-impian kita tentang keadilan dan pemerataan kesejahteraan. Untuk mengatasi segala

kelemahan, kekurangan, keburukan, dan bahkan segala sesuatu yang kita persepsikan sebagai kegagalan pemerintahan Orde Baru itu bangsa kita telah memilih jalan dengan menata kehidupan ketatanegaraan yang lebih demokratis dan mempertegas komitmen normatif bangsa kita untuk mengembangkan prinsip negara hukum yang menjamin kebebasan dan hak asasi manusia, serta janji kesejahteraan yang lebih merata, semata-mata untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itulah selama 12 tahun terakhir kita telah menata ulang secara besar-besaran postur dan sistem kelembagaan negara dan pemerintahan kita, mekanisme penyelenggaraannya yang diharapkan lebih berubah semakin modern, transparan dan akuntabel. Kita mengubah institusi-institusi kenegaraan dan pemerintahan itu, mulai dari lembaga yang semula paling tinggi kedudukannya, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sampai ke institusi pemerintahan desa dan kelurahan-kelurahan di lingkungan perkotaan. Kita juga sudah melakukan merombakan sistem hukum dan perundang-undangan kita secara besar-besaran, mulai dari hukum tertinggi, yaitu konstitusi sampai ke peraturan-peraturan daerah dan bahkan peraturan-peraturan desa. Semuanya berubah dengan sangat cepat dan sangat mendasar. Dengan demikian, di tengah-tengah gelombang perubahan yang sedang terjadi di dunia dimana bangsa kita dipengaruhi secara sangat luas dan mendasar di segala bidang, kita pun mengadakan perubahan-perubahan mendasar dalam waktu yang sangat singkat, tanpa persiapan budaya yang dapat dikatakan matang. Perubahan-perubahan bersifat sangat struktural dan instrumental yang tentunya dapat dipakai untuk melakukan fungsi perekayasaan masa depan bangsa ke arah idealitas yang dikehendaki bersama.

Dimensi kebudayaan dan tuntutan akan kualitas sumber daya manusia yang akan diandalkan dapat dikatakan tertinggal. Perubahan demi perubahan mendasar

tersebut di atas tidak diiringi oleh perubahan kualitas individu manusia dan kolektifitas budaya yang sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan. Institusi-institusi baru lebih diharapkan lebih baik telah kita dirikan, tetapi cara berpikir dan bekerja manusia yang diharapkan menggerakkan masih terbelakang dan dikungkung oleh pengaruh tradisi yang diwarisi dari masa-masa yang lalu. Ide-ide baru telah banyak pula kita adopsi dan kita tuangkan menjadi materi-materi peraturan perundang-undangan yang kita percaya akan membawa hasil yang serba luhur dan mulia, tetapi manusia-manusia yang diharapkan akan menjalankannya rupanya sebagian terbesar masih terperangkap dengan sikap-sikap dan perilaku lama. Dengan demikian, kita terus menerus menyaksikan adanya kesenjangan yang akut antara institusi dan instrumen aturan di satu pihak dengan kebiasaan dan tradisi di pihak yang lain.

Jawabannya tentu tiada lain adalah bahwa di masa mendatang kita memerlukan reformasi lanjutannya, yaitu reformasi budaya atau reformasi kebudayaan. Sejak tahun 1998 kita telah memulai agenda reformasi politik dan birokrasi, reformasi ekonomi, dan reformasi hukum. Sekarang atau setidaknya mulai tahun 2014 nanti, kita harus menggerakkan reformasi lanjutan, yaitu reformasi kebudayaan. Reformasi budaya itu tentu harus kita mulai dengan persoalan kualitas manusia, yaitu manusia ideal yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu cita-cita kehidupan bangsa yang cerdas. Agar menjadi cerdas, maka manusia dan bangsa Indonesia haruslah terdidik dengan baik, yaitu melalui pendidikan yang bermutu, relevan, dan merata. Pendidikan nasional yang diselenggarakan untuk itu, menurut Pasal 31 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak lain adalah pendidikan yang meningkatkan

keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, agar menjadi cerdas, pertama-tama manusia Indonesia itu haruslah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, sehingga tujuan untuk menguasai, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang hendak dicapai oleh dan dari setiap kegiatan pendidikan dapat didampingi secara seimbang oleh penghayatan, pemahaman, dan pengamalan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang secara konkrit tercermin dalam perilaku luhur dan akhlak mulia dalam semua bidang kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

1. Proses pendidikan budaya dan karakter bangsa merupakan satu rangkaian proses humanisasi, sehingga keduanya tidak dapat dan tidak boleh dipisahkan. Proses pendidikan adalah proses pembudayaan, dan proses pembudayaan adalah proses pendidikan. Alienasi proses pendidikan dari kebudayaan berarti menjauhkan pendidikan dari perwujudan nilai-nilai moral di dalam kehidupan manusia.
2. Proses pendidikan budaya dan karakter bangsa bukan semata penguasaan pengetahuan, keterampilan teknis saja, karena ini sekedar alat, atau perkakas. Tetapi proses pendidikan harus bertumpu pada anak itu sendiri, untuk dapat berkembang mencapai sempurnanya hidup. Karena buahnya pendidikan adalah matangnya jiwa anak, yang akan dapat mewujudkan hidup dan penghidupan yang sempurna dan memberikan manfaat bagi orang lain dan lingkungannya.
3. Dalam perjalanannya, proses pendidikan budaya dan karakter bangsa harus berhadapan dengan arus globalisasi yang membawa dampak positif maupun negative. Ekse globalisasi ini mempengaruhi gaya hidup suatu bangsa, yang pada gilirannya dapat mereduksi, bahkan

- merusak harkat, martabat dan jati diri bangsa.
4. Sebagai upaya mempertahankan dan membangun harkat, martabat dan jati diri bangsa, perlu digalakkan pendidikan karakter yang salah satunya dapat ditempuh melalui pengembangan budaya sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Karya Ilmu Surabaya, sejarah perjalanan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang - Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Jakarta, 2003.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 tentang "Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. "pdf
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 yang mengamanatkan program penguatan metodologi dan kurikulum dengan cara menyempurnakan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai - nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa, Jakarta 19 Februari 2010. "pdf
- Pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa Kementrian pendidikan nasional badan penelitian dan pengembangan pusat kurikulum, Tahun 2010.
- Warta Hukum dan Perundang-Undangan Volume 12, Desember 2011 Oleh **Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H. M.H.**
- Kementerian Pendidikan Nasional, Badan penelitian dan pengembangan, Pusat kurikulum. 2011, *Pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa pedoman sekolah*. Jakarta: Pusat Kurikulum
- Kuntoro, Sodik A. 2011, *Pendidikan dalam Kehidupan dan Untuk Perbaikan Kehidupan*, Yogyakarta : Makalah Sambutan pada Seminar Nasional Ilmu Pendidikan.